

## *Tinjauan Filosofis Praktik Gotong Royong*

**Gunardi Endro**

**ABSTRAK:** Gotong royong adalah ungkapan yang menyatakan saling membantu dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong menyatakan apa yang dipahami sebagai solidaritas dan kesatuan maka diangkat dan dikembangkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi jiwa dan semangat gotong royong tersebut dalam membangun solidaritas dan kesatuan bagi perwujudan kejayaan Indonesia. Kini kebutuhan mengenai solidaritas dan kesatuan tidak bisa lagi diperlakukan sama dengan lazim dalam kehidupan tradisional. Oleh sebab itu, paper ini bertujuan memberi jalan keluar bagi penguatan semangat dan jiwa gotong royong berdasarkan filsafat Aristoteles mengenai pertemanan sedemikian rupa sehingga dalam konteks kekinian Indonesia mampu berhadapan dengan globalisasi tanpa harus kehilangan identitas nasionalnya.

**KATA KUNCI:** Gotong royong, kerjasama sukarela, jati diri, Aristoteles, pertemanan (*friendship*)

**ABSTRACT:** Gotong royong is an expression of mutual help and usually practiced in local communities all over Indonesia. Gotong royong reflects the idea of solidarity and unity and therefore it is adopted and maintained as the way of life for all Indonesian. Pancasila is the crystallization of the spirit of gotong royong to inspire the people of Indonesia to build solidarity and unity in bringing the nation to its glory. Today the need for solidarity and unity can no longer be handled by the practice of mutual help in its traditional sense. There is therefore this paper aiming to redeem the spirit of mutuality by contextualizing Aristotle philosophy of friendship in a way that modern Indonesia has to face globalized world while preserving its national identity

**KEY WORDS:** *gotong royong, mutual help, self identity, Aristotle, and friendship*

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang mengaku orang Indonesia tidak mengenal praktik gotong royong. Meskipun istilah yang dipakai di masing-masing suku berbeda-beda, tergantung juga pada apakah jenis kegiatannya di bidang ekonomi, sosial, ataukah religi, namun kesemuanya dirangkum dan disepadankan dengan istilah “gotong royong”.<sup>1</sup> Popularitas istilah gotong royong tak lepas dari upaya yang dilakukan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari Sukarno dan Suharto sampai sekarang, untuk mempromosikannya. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Sukarno memposisikan gotong royong sebagai asas sentral negara-bangsa Indonesia sebagaimana beliau katakan:

“Pancasila...[j]ikalau saya peras...maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong’...Negara *gotong-royong!* Alangkah hebatnya! *Negara gotong-royong!*”<sup>2</sup>

Dalam pikiran Sukarno, Negara Indonesia terbentuk tidak hanya karena satunya perasaan tertindas di tanah jajahan yang kemudian menjelma menjadi satunya aspirasi kepentingan politik untuk merdeka, tetapi juga karena satunya semangat gotong royong atau semangat kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan. Persoalan gotong royong adalah persoalan jiwa dan semangat bergotongroyong karena, bagi Sukarno, gotong royong adalah legitimasi kultural pembentukan negara-bangsa Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Suharto, gotong royong masuk dalam program pengamalan dan penghayatan Pancasila, terutama sila keempat

(Demokrasi Pancasila). Pancasila dan gotong royong dipergunakan untuk menciptakan stabilitas nasional yang dipersepsikannya merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan pembangunan.<sup>3</sup> Bagi Suharto, persoalan gotong royong adalah persoalan praktik dan oleh karena itu beliau lebih menekankan sanksi sosial dan ekonomi untuk mendorong keikutsertaan setiap warga Negara dalam bergotong royong. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia selanjutnya berusaha membangkitkan semangat gotong royong meskipun tidak mudah mewujudkannya dalam praktik nyata di era globalisasi dan modernisasi.<sup>4</sup> Agar dapat memahami kompleksitas bangkitnya semangat dan praktik gotong royong, maka penyelidikan tentang karakteristik dan hakekat gotong royong perlu dilakukan terlebih dahulu.

## **2. KARAKTERISTIK DAN HAKEKAT GOTONG ROYONG**

Istilah “gotong royong” berasal dari bahasa Jawa. Koentjaraningrat (1985) merujuk istilah itu pada sistem kerjasama tolong-menolong masyarakat agraris dalam bercocok tanam, pembuatan dan perbaikan rumah, penyelenggaraan pesta, kegiatan spontan penanganan musibah, dan pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk pembuatan dan perbaikan fasilitas umum. Jadi, ada dua jenis gotong royong, yaitu gotong royong untuk fasilitas kehidupan milik pribadi dan gotong royong untuk fasilitas kehidupan milik umum.<sup>5</sup> Pada jaman penjajahan, gotong royong jenis kedua sering disalahgunakan untuk pengerahan tenaga murah rakyat dalam bentuk kerja paksa. Latar belakang atau alur pemikiran timbulnya semangat gotong royong pada masyarakat agraris dapat dirangkai sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Nasib mengendalikan manusia dalam posisi saling-terkait di dalam masyarakat dan alam semesta raya.
2. Kesaling-terkaitan membuat manusia tergantung kepada sesamanya di masyarakat.
3. Kesaling-tergantungan kepada sesamanya mendorong manusia untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya atas dasar perasaan sama-rata sama-rasa.
4. Hubungan baik manusia dengan sesamanya memerlukan sikap untuk selalu menyesuaikan diri, berbuat sama dan bersama-sama atas dasar perasaan sama-tinggi sama-rendah.

Sikap untuk menyesuaikan diri, berbuat sama dan bersama-sama diwujudkan dalam praktik gotong royong tradisional. Sebagai contoh, misalnya, ketika dengan adat sopan santun seorang anggota komunitas dimintai pertolongan oleh tetangganya untuk bersama-sama menanam benih padi, maka orang tersebut harus menyanggupi meskipun hanya diberikan kompensasi makan siang. Keharusan untuk menyanggupi didasarkan pada anggapan bahwa di kemudian hari ketika dia memerlukan pertolongan yang sama untuk lahan miliknya, tetangga tersebut harus menyanggupi juga. Jika dia lalai dari kesanggupannya, maka riwayatnya akan tercatat dalam ingatan tetangga-tetangganya sehingga dia tidak akan mendapatkan pertolongan saat membutuhkan. Kelalaiannya akan berakibat sangsi sosial berupa pengucilan dari pergaulan antar warga dan sangsi ekonomi berupa kesulitan untuk memperoleh penghasilan dan sarana hidup yang bisa dimilikinya di lingkungan tersebut. Sementara itu, seseorang yang nasibnya berada pada posisi tinggi (pemimpin)

dalam strata sosial akan memperoleh perlakuan istimewa dan tindak-tanduknya akan dipakai sebagai rujukan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pola pikir yang berorientasi pada nasib, sarana hidup, riwayat, keselarasan, dan patrimonialisme itulah yang melatarbelakangi timbulnya praktik gotong royong tradisional. Masalahnya, pola pikir dalam praktik gotong royong tradisional seperti itu berbeda kontras dengan pola pikir yang umumnya berkembang pada dan dibutuhkan oleh masyarakat industrial di era modernisasi, sebagaimana dirangkum Koentjaraningrat (1987a) berikut ini:<sup>7</sup>

Pola Pikir	Masyarakat Agraris	Masyarakat Industrial
Tentang hidup	Ditentukan nasib	Ditentukan manusia sendiri
Tentang kerja	Untuk mendapatkan sarana hidup	Untuk keahlian
Tentang orientasi waktu	Orientasi ke masa lalu (riwayat)	Orientasi ke masa mendatang
Tentang hubungan antar sesama dan dengan alam semesta	Mengandalkan keselarasan hubungan	Mengandalkan kemampuan manusia sebagai pengendali hubungan
Tentang manusia dalam masyarakat	Sama-rata-sama-rasa, kebersamaan, dan respek kepada patron dalam strata sosial	Individualisme, kemandirian, dan respek kepada orang yang berprestasi tinggi

Pembangunan ekonomi yang memasukkan pola pikir masyarakat industrial mengakibatkan tekanan dan ketegangan pada pola pikir masyarakat agraris yang sudah ada, sehingga semangat bergotongroyong pun ditengarai mulai meredup. Beberapa varian praktik gotong royong seperti “*sambatan*”, “*guyuban*”, “*ronda*”, dan bahkan “*gugur-gunung*” mulai menghilang atau kehilangan kemurniannya.<sup>8</sup> Praktik gotong royong yang masih tersisa umumnya terkait dengan musibah atau bencana alam, seperti misalnya “*tetulang layat*” yang bisa jadi bukan didorong oleh semangat bergotongroyong, melainkan oleh kepatuhan pada ajaran agama.<sup>9</sup> Sekalipun ancaman sangsi sosial dan sangsi

ekonomi diterapkan untuk memaksa orang bergotongroyong, namun adanya toleransi penggunaan wakil pengganti yang bisa dibayar oleh orang yang wajib bergotongroyong, seperti misalnya pada praktik *ronda* atau *gugur-gunung*, jelas mengurangi kemurnian gotong royong. Jika toleransi seperti itu ditiadakan, akibatnya justru akan menghilangkan sifat kesukarelaan yang menjadi ciri khas esensial gotong royong.

Jika ditinjau secara seksama, sistem gotong royong berbeda dengan sistem kolektivisme karena individualitas individu masih dikenal dan kepemilikan pribadi masih diakui. Kehadiran dan kebebasan individu pada tingkat tertentu menjadi syarat untuk memastikan bahwa partisipasi individu dalam gotong royong bersifat sukarela. Akan tetapi, gotong royong jelas tidak mempromosikan individualismeyang mengagungkan kebebasan individu dengan setiap keputusan yang dipilihnya. Karena dalam sistem gotong royong ada rasa kepedulian antar sesama yang seolah-olah mengikat individu bersama-sama dan membatasi kebebasan individu dengan pilihan-pilihannya. Jadi setidaknya ada dua karakteristik esensial gotong royong dalam berbagai variannya, yaitu kesukarelaan dan kebersamaan. Dalam *kesukarelaan* terkandung aspek pengakuan individualitas individu, sedangkan dalam *kebersamaan* terkandung aspek solidaritas yang terbentuk dari rasa kepedulian antar sesama.

Tinjauan lebih lanjut mengaitkan gotong royong dengan kekeluargaan. Memang keeratan hubungan antar sesama individu dalam sistem gotong royong sangat mirip dengan keeratan hubungan antar anggota keluarga. Namun gotong royong berbeda dengan kekeluargaan, karena gotong royong sifatnya dinamis sementara kekeluargaan bersifat statis.<sup>10</sup> Gotong royong selalu merujuk pada suatu usaha atau pekerjaan dengan tujuan tertentu,<sup>11</sup> sedangkan kekeluargaan adalah

keadaan dalam suatu hubungan. Jadi dapat dikatakan bahwa *kerja* merupakan karakteristik esensial ketiga dari gotong royong. Jika tiga karakteristik esensial gotong royong: kesukarelaan, kebersamaan, dan kerja, dipadukan jadi satu rangkaian kata yang secara singkat menggambarkan makna inti gotong royong maka didapatkan “kerjasama sukarela”. Tentu makna *kerjasama sukarela* yang dimaksud disini bukanlah makna tipis (*thin meaning*), melainkan makna tebal/mendalam (*thick meaning*) karena mengandung asumsi adanya suatu komunitas dimana tiap anggotanya mempunyai rasa saling peduli satu terhadap lainnya. Masalahnya kemudian, dimanakah letak nilai gotong royong? Apakah terletak pada hasil kerjasama atautkah pada kebersamaan bekerja itu sendiri? Persoalan ini penting untuk ditinjau karena memiliki problematikanya tersendiri.

### 3. PERSOALAN MOTIVASIONAL INDIVIDU KETIKA NILAI GOTONG ROYONG TERLETAK PADA HASILNYA

Jika nilai gotong royong dianggap terletak pada hasil kerjasama sukarela, sistem gotong royong harus siap bersaing dari segi efektivitas dan efisiensi dengan sistem aktivitas lain yang berorientasi sama. Titik tolak sistem gotong royong berupa prinsip moral resiprositas atau tukar balas (*principle of reciprocity*),<sup>12</sup> yaitu bahwa orang harus membalas budi orang lain yang telah menolongnya terlebih dahulu atau akan menolongnya di kemudian hari. Jika diinterpretasikan secara luas, prinsip ini berlaku tidak hanya pada jenis gotong royong untuk fasilitas kehidupan milik pribadi tetapi juga pada jenis gotong royong untuk fasilitas kehidupan milik umum. Pada jenis gotong royong untuk fasilitas kehidupan milik umum, prinsip resiprositas berlaku antara tiap orang anggota komunitas dengan komunitas secara keseluruhan. Tukar balas berlaku

antara tiap orang anggota komunitas dengan keseluruhan anggota komunitas. Oleh karena itu, jika seseorang selalu mangkir dari gotong royong untuk fasilitas kehidupan milik umum (*free rider problem*), dia akan mendapatkan sanksi sosial (“pengucilan”) yang dampaknya bisa mengurangi berkembangnya fasilitas kehidupan yang dimilikinya secara pribadi. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika nilai gotong royong dianggap terletak pada hasil kerjasama sukarela, individu anggota komunitas gotong royong berperan sebagai agen ekonomi dan prinsip moral resiprositas berfungsi sebagai landasan sistem ekonomi gotong royong. Sistem ekonomi gotong royong seperti itu masih bersifat tradisional karena uang belum diperkenalkan sebagai alat tukar dan alat penyimpan nilai.

Akan tetapi, sistem ekonomi gotong royong tradisional sulit diharapkan mampu menyaingi efektivitas sistem ekonomi pasar dalam menciptakan hasil tertentu, karena dua alasan sebagai berikut:

- (1) Dalam sistem ekonomi gotong royong tradisional tidak ada motivasi ekstrinsik (*extrinsic motivation*) pada individu untuk lebih kreatif dan lebih unggul dalam berkarya. Artinya, tidak ada mekanisme eksternal antar individu yang memberi tekanan pada individu untuk bekerja keras meningkatkan kemampuan diri dalam bekerja dan menciptakan hasil yang lebih baik. Justru perasaan ketidaksukaan (perasaan iri) akan muncul ketika ada orang yang tampak menonjol dalam komunitas,<sup>13</sup> agar setiap orang selalu merasa “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”,<sup>14</sup> sama-rata sama-rasa, *podo-podo* (sama-sama), dan *tepo-sliro* (menjaga perasaan orang lain). Sebagai agen ekonomi, individu hanya memiliki motivasi intrinsik (*intrinsic motivation*) untuk bekerja lebih baik, artinya daya



- pendorong individu untuk bekerja lebih baik hanya berasal dari kesenangannya sendiri pada pekerjaannya.<sup>15</sup>
- (2) Ketika uang dilibatkan sebagai acuan pengukur nilai (*common denominator*), semua alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan bisa diperbandingkan dan keputusan pun bisa segera diambil. Artinya, penggunaan uang sebagai acuan pengukur nilai akan mendatangkan persaingan. Orang akan dengan mudah membandingkan alternatif pilihan keputusan antara mengikuti kegiatan kerja bakti (*gugur gunung*) dan membayar orang lain untuk mewakilinya sehingga dia bisa mempergunakan waktunya untuk mengurus bisnis sendiri. Orang juga bisa membandingkan alternatif pilihan keputusan antara menggunakan sistem gotong royong untuk menyelenggarakan pesta pernikahan dan menggunakan *event organizer* untuk mengurus segalanya. Pendek kata, ketika uang dilibatkan dan persaingan muncul, sistem ekonomi pasar beserta motivasi ekstrinsik individu yang menyertainya akan menggeser sistem ekonomi gotong royong tradisional, sehingga sistem ekonomi gotong royong sedikit demi sedikit akan ditinggalkan.

Jadi ketika nilai gotong royong dianggap terletak pada hasil kerjasama sukarela, praktik gotong royong merupakan suatu aktivitas ekonomi yang bisa jadi hasilnya tidak seefektif dan seefisien aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi pasar. Oleh karena itu, upaya pelestarian gotong royong terancam tidak efektif mengingat alternatif aktivitas bentuk lain bisa jadi memberikan hasil yang lebih baik. Sebagai agen ekonomi, individu cenderung memilih aktivitas ekonomi lain

daripada terlibat dalam praktik gotong royong. Asumsi bahwa nilai gotong royong terletak pada hasil aktivitas gotong royong menimbulkan persoalan motivasional pada diri individu dalam upaya pelestarian gotong royong. Jika praktik gotong royong secara pragmatis dipaksakan oleh otoritas penguasa (pemerintah) dalam sistem ekonomi yang sudah dipengaruhi mekanisme pasar, misalnya demi alasan politik tertentu, akibatnya justru akan mendelegitimasi makna kegotongroyongan. Sebabnya, orang akan merasa kehilangan kesempatan memperoleh kemajuan ekonomi yang lebih baik dan tidak akan sukarela terlibat dalam praktik gotong royong.

#### **4. PERSOALAN MOTIVASIONAL INDIVIDU KETIKA NILAI GOTONG ROYONG TERLETAK PADA KEBERSAMAAN**

Kalau pelestarian gotong royong ternyata tidak efektif lantaran hasilnya tidak memenuhi harapan, pembenaran upaya tersebut biasanya bergeser pada argumen bahwa nilai gotong royong terletak pada kebersamaan dan kesukarelaan individu-individu yang terlibat dalam praktiknya. Masalahnya adalah, kemudian, kebersamaan atau solidaritas seperti apa yang akan diwujudkan dalam praktik gotong royong? Kartodirdjo (1978) mengidentifikasi bahwa masyarakat desa tradisional tempat berlangsungnya praktik gotong royong memiliki ciri kemiripan antar individu yang tinggi, baik dalam wujud kerja fisik maupun psikis, kepercayaan dan sentimen, sehingga hubungan antar individu lebih banyak didasarkan atas ikatan emosional seperti yang umumnya berlaku pada masyarakat primordial. Dalam pengertian Emile Durkheim (1933), solidaritas sosial yang timbul dalam masyarakat homogen seperti itu berupa solidaritas mekanistik yang dicapai secara sederhana melalui integrasi struktural. Dalam

hal ini tanggung jawab individu hanya sebatas pada tanggung jawab untuk ikut serta bersama-sama dalam praktik gotong royong, bukan pada apa yang dilakukan di dalamnya. Kolektivitas yang terbentuk melalui integrasi struktural mengaburkan tanggung jawab individu atas apa yang dilakukannya.

Pada masyarakat yang sudah berkembang dengan pembagian pekerjaan (*division of labor*) yang lebih kompleks, masing-masing individu memiliki fungsi yang lebih spesifik di dalam komunitasnya dan dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan sesuai dengan fungsinya. Menurut Durkheim (1933), solidaritas sosial yang dituntut dalam masyarakat yang pembagian pekerjaan di dalamnya sudah berkembang adalah solidaritas organik, dicapai melalui integrasi fungsional. Hubungan antar individu tidak didasarkan atas ikatan emosional, melainkan berupa hubungan tidak langsung mengikuti suatu sistem aturan yang fungsinya mirip dengan sistem syaraf organik. Tanggung jawab individu disini adalah ikut serta mewujudkan solidaritas organik dengan mengoptimalkan berfungsinya pekerjaan atau profesi yang disandangnya di masyarakat. Singkatnya, tanggung jawab individu dalam masyarakat yang pembagian pekerjaan di dalamnya sudah berkembang adalah tanggung jawab profesional.<sup>16</sup>

Jika sistem gotong royong tradisional dipraktikkan dalam masyarakat yang pembagian pekerjaan di dalamnya sudah berkembang, bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan sikap individu yang kontraproduktif karena dia merasa bahwa tanggung jawab fungsionalnya diambil alih secara kolektif oleh komunitasnya. Individu merasa tidak perlu bekerja keras menjadi ahli di bidangnya karena apa yang penting dan bernilai bagi komunitas gotong royong adalah kebersamaan (solidaritas mekanistik). Pelestarian gotong royong

seperti ini diragukan kemampuannya untuk meningkatkan fungsi masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik. Individu-individu yang terlibat pun bisa jadi akan merasa kehilangan tantangan dalam hidupnya dan memilih alternatif kebersamaan lain yang dirasakannya lebih baik. Sebagai agen sosial, individu hanya akan memilih praktik gotong royong ketika urgennitas kontribusinya lebih dibutuhkan daripada tanggung jawab profesionalnya, seperti misalnya sumbangan gotong royong untuk penanggulangan bencana. Namun secara umum, bilamana urgennitas tersebut tidak ada, individu akan lebih memilih aktivitas sosial lain daripada terlibat dalam praktik gotong royong. Sikap sinis terhadap gotong royong bahkan bisa muncul sehingga nilai gotong royong gagal mewujudkan. Jadi, asumsi bahwa nilai gotong royong terletak pada kebersamaan juga menimbulkan persoalan motivasional pada diri individu dalam upaya pelestarian gotong royong.

##### **5. KONSEP DIRI ARISTOTELIAN SEBAGAI JALAN KELUAR PERSOALAN MOTIVASIONAL INDIVIDU**

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa, baik fokus pada nilai hasilnya maupun fokus pada nilai aktivitasnya (kebersamaan beraktivitas) ternyata mengandung persoalan motivasional pada diri individu dalam upaya pelestarian gotong royong. Alternatif ketiga, yaitu fokus pada diri subjek pelaku aktivitas atau penghasil nilai, perlu dieksplorasi mengingat prospeknya untuk mengatasi persoalan motivasional sangat menjanjikan. Singkatnya, jika aktualisasi diri individu hanya bisa terwujud ketika dia ikut mewujudkan kebersamaan beraktivitas dengan individu-individu lain dan sekaligus memberikan hasil yang bernilai tinggi, maka persoalan motivasional

teratasi dengan sendirinya. Solusi seperti ini saya temukan dalam “konsep diri yang diperluas” yang dapat dikembangkan dari etika keutamaan Aristoteles (*Aristotelian conception of the expanded self*).

Aristoteles sendiri sebenarnya tidak secara eksplisit melakukan penyelidikan tentang konsep diri, namun tampaknya dia memiliki pandangan tertentu tentang kedirian individu ketika dia membahas tentang persoalan pertemanan (*friendship*). Ketika dia menyebutkan bahwa buat orang berkeutamaan (*the virtuous man*) seorang teman adalah “diri yang lain” (*allos autos*),<sup>17</sup> Aristoteles tampaknya menganjurkan suatu konsep diri yang lebih luas daripada batas-batas diri yang alami. Sayangnya Aristoteles tidak menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan *allos autos* dan bagaimana hubungan antara diri dengan *allos autos* itu. Stern-Gillet (1985) berpendapat bahwa pengertian Aristoteles tentang pertemanan yang baik (*virtuous friendship*) dalam kaitannya dengan *allos autos* adalah suatu pertemanan yang melampaui batasan yang berkenaan dengan terpisahnya individu sedemikian sehingga tercipta semacam kesatuan psikis antar individu.<sup>18</sup> Menurut hemat saya, relasi dalam suatu pertemanan yang baik lebih dari sekedar terciptanya kesatuan psikis antar individu. Relasi itu dapat diselidiki dari penyebutan *allos autos* oleh Aristoteles yang hampir selalu dikaitkan dengan karakteristik orang berkeutamaan, seperti misalnya berikut ini:

“... if as the virtuous man is to himself, he is to his friend also (for his friend is another self)...”<sup>19</sup>

Untuk memahami relasi pertemanan yang baik seperti itu, saya mengusulkan suatu skema relasi *triadik* yang menghubungkan “orang

berkeutamaan” (*the virtuous man*), “orang yang bersangkutan” (*himself*) dan “temannya” (*another self*) sedemikian sehingga kesatuan antar teman selalu merujuk pada relasi jenis triadik ini. Jadi ketika dua orang menyatakan berteman, masing-masing mengharapkan temannya berkelakuan sebagaimana orang berkeutamaan memperlakukan temannya. Yang dimaksud “orang berkeutamaan” di sini bukanlah abstraksi ideal dari seseorang ataupun seseorang riil yang secara universal diharapkan semua orang yang berteman, melainkan lebih merujuk pada atribut-atribut standar yang melekat pada individu-individu riil yang membuat mereka jadi berteman satu dengan lainnya sedemikian sehingga, pada taraf tertentu, masing-masing individu masih bisa mempertahankan kekhasan dan partikularitasnya. Individu-individu yang berteman tidak meleburkan kekhasan dan partikularitasnya masing-masing, melainkan memperlakukan temannya sebagaimana orang berkeutamaan memperlakukan temannya. Hanya karena dia sendiri dan temannya memiliki atribut orang berkeutamaan, maka temannya menjadi diri yang lain (*allos autos*). Jika kumpulan individu-individu yang berteman baik atau yang memiliki atribut orang berkeutamaan tersebut dinamakan komunitas ideal, maka dapat disimpulkan bahwa skema relasi triadik tersebut merupakan suatu skema yang menghubungkan komunitas ideal (*the ideal community*), orang yang bersangkutan (*himself*) dan temannya (*another self*). Dalam skema triadik ini, kesatuan antar teman diwujudkan dalam komunitas ideal. Penjelasan lebih lanjut tentang komunitas ideal tidak akan diberikan di sini mengingat keterbatasan ruang yang ada, namun secara singkat dapat dikatakan bahwa komunitas ideal merupakan komunitas yang seharusnya ada untuk tujuan kehidupan bersama yang baik dimana tiga keutamaan sosial harus dijamin

keterwujudannya yakni otonomi individual (*autonomy*), kepedulian (*care*) dan keadilan (*justice*).<sup>20</sup>

Berkenaan dengan konsep diri, ketika seseorang dan temannya memiliki atribut sebagai orang yang berkeutamaan, komunitas ideal yang beranggotakan dia dan temannya dalam arti tertentu menjadi bagian dari dirinya, karena dengan begitu diri temannya merupakan dirinya yang lain (*allos autos*). Seorang berkeutamaan akan selalu mengharapkan teman-temannya memiliki atribut sebagai orang yang berkeutamaan juga, karena dengan begitu dia mewujudkan komunitas ideal dan sekaligus mewujudkan dirinya sendiri. Justru untuk mengekspresikan diri sebagai orang berkeutamaan, orang harus berjuang mewujudkan komunitas ideal karena perwujudan komunitas ideal menjadi bagian dari perwujudan dirinya. Diri disini lebih berupa suatu entitas yang berkaitan erat dengan capaian moral atau hasil interaksi sosial yang sifatnya normatif daripada merupakan suatu entitas mandiri yang menjadi objek penjelasan yang sifatnya deskriptif.<sup>21</sup> Diri dipahami sebagai “menjadi diri” (*becoming*) dengan secara aktif membiasakan diri melakukan tindakan-tindakan berkeutamaan demi terwujudnya komunitas ideal.

Perlu dipahami bahwa pertemanan (*friendship*) yang dimaksudkan Aristoteles tidak terbatas pada hubungan antar “teman” dalam pengertian modern, melainkan meliputi semua hubungan antar individu yang *de facto* berada dalam kebersamaan, termasuk hubungan antar individu dalam suatu keluarga, kelompok satu ras, kelompok satu perjalanan, bahkan suatu Negara.<sup>22</sup> Dengan demikian, konsep diri yang dikembangkan dari pengertian Aristoteles tentang pertemanan (*friendship*) di atas dapat diterapkan pada konteks kebersamaan dalam gotong royong. Jika setiap orang memiliki konsep diri yang diperluas seperti itu, semangat gotong royong atau semangat kerjasama sukarela

dengan sendirinya akan dimilikinya pula. Dia bekerjasama dengan teman-teman kerjanya bukan karena terobsesi pada hasil kerjasama, bukan pula karena terjerat dalam relasi statis kebersamaan dengan teman-temannya, melainkan karena ingin mewujudkan komunitas ideal dimana dia harus saling peduli dan saling bahu-membahu bekerja bersama teman-temannya untuk mencapai tujuan komunitas yang telah disepakati. Hanya dengan cara itu, dia merasa hidup dan mewujudkan dirinya. Jadi, upaya melestarikan jiwa dan semangat gotong royong dilakukan tidak dengan secara sederhana mempromosikan praktik gotong royong tradisional, tetapi dengan mengembangkan karakter individu melalui pembentukan konsep diri yang diperluas, meliputi komunitas ideal yang mau diwujudkan demi pencapaian tujuan bersama.

Di dalam membentuk konsep diri yang diperluas meliputi komunitas ideal, seorang individu mengidentifikasi dirinya dengan komunitas ideal di mana dia dan teman-temannya diproyeksikan menjadi anggotanya. Melalui identifikasi ini, komunitas ideal sedikit-dikitnya menjadi bagian yang menentukan dan menjelaskan sosok seperti apa dia dan mengapa dia melakukan suatu tindakan sebagai tanggapan terhadap situasi tertentu dengan mempertimbangkan komunitas ideal yang diperjuangkannya. Dalam proses pengidentifikasian dengan komunitas ideal, diskusi, kritik dan perbedaan pendapat antar teman tentang komunitas ideal dimungkinkan, karena melalui cara itu masing-masing pihak yang berteman melakukan introspeksi dan perbaikan. Sebesar apapun perbedaan yang ada antar teman, perbedaan itu harus bisa digiring ke arah solusi yang sehat karena pertemanan yang baik seharusnya membuat semua pihak menjadi baik dan memperoleh kehidupan yang baik. Pengidentifikasian dengan komunitas ideal disini berbeda dengan,



dan bukan seperti, pengidentifikasian yang dianjurkan Arne Naess (1993) dalam filsafat *deep-ecology (Ecosophy-T)*,<sup>23</sup> dimana pengidentifikasian dimaknai kurang lebih sebagai peleburan diri ke dalam sesuatu yang lebih besar atau “*sense of belonging*”. Pengidentifikasian di sini juga berbeda dengan, dan bukan seperti, pengidentifikasian yang menjurus pada tindakan apropriasi seperti yang digambarkan Sartre (1957) dalam *Being and Nothingness*,<sup>24</sup> sejenis anjuran populer “merasa ikut memiliki” (*melu handarbeni*). *Sense of belonging* pada komunitas cenderung membuat individu terjat dalam relasi statis kebersamaan, sedangkan *merasa ikut memiliki* komunitas cenderung menimbulkan konflik antar individu di mana secara inheren tidak tersedia jalan untuk memperoleh solusi. Identifikasi dengan komunitas ideal yang dimaksudkan di sini lebih menekankan proyeksi ke dalam makna dirinya dari komunitas ideal yang sungguh-sungguh diperjuangkan individu dalam tindakan-tindakan kontributif riil terbaik, sekecil apapun. Sungguh-sungguh diperjuangkan, bukan sekedar ikut-serta dalam berjuang bersama komunitasnya ataupun sekedar bangga karena menguasai makna konsep komunitas ideal yang diperjuangkannya.

## 6. PENUTUP

Pengembangan karakter individu melalui pembentukan konsep diri yang diperluas meliputi komunitas ideal dapat mengatasi persoalan motivasional individu dalam upaya pelestarian jiwa dan semangat gotong royong. Karena, bagi individu yang mengembangkan konsep diri tersebut, komunitas gotong royong yang ideal adalah bagian dari dirinya. Sebagai anggota komunitas gotong royong, dia selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik dalam

perjuangan bersama individu-individu lain untuk mewujudkan komunitas ideal, meskipun harus memberikan kesempatan kepada individu lain untuk memimpinya atau bahkan untuk mengambil alih tindakan yang sebenarnya ingin dilakukannya sendiri, mengingat apa yang terpenting bagi dirinya adalah cara terbaik terwujudnya komunitas ideal, tercapainya tujuan bersama, melalui kontribusinya dia dengan sendirinya menjadi (*to be*). Kerjasama sukarela bersifat dinamis, sekalipun perlu melibatkan persaingan, karena memberikan kesempatan kepada/pada yang terunggul untuk mengekspresikan kontribusi terbaik demi terwujudnya komunitas ideal, tercapainya tujuan bersama, adalah suatu kontribusi terbaik pula. Di sini tidak ada kebersamaan statis yang menghambat perkembangan individu yang menonjol prestasinya. Justru individu yang unggul akan diapresiasi dan didorong oleh individu-individu lain untuk meningkatkannya, sedangkan individu yang tidak unggul pada bidang tertentu didorong untuk meningkatkan kemampuannya atau untuk menemukan suatu bidang dimana dia bisa menjadi yang terunggul demi memaksimalkan terwujudnya komunitas ideal dan tercapainya tujuan bersama. Dengan jiwa dan semangat gotong royong seperti ini, segala bentuk kerjasama sukarela bisa dimungkinkan, baik varian-varian praktik gotong royong tradisional maupun varian-varian praktik kerjasama profesional modern, asalkan varian itu merupakan varian praktik terbaik untuk mewujudkan komunitas ideal dan pencapaian tujuan bersama.

Karakteristik positif tersebut di atas hanya mungkin ada kalau relasi pertemanan (*friendship*) antar individu tidak bersifat diadik, melainkan bersifat triadik yang acuan utamanya adalah terwujudnya komunitas ideal.

Melalui pembiasaan praktik pertemanan dalam skema relasi triadik, individu memproyeksikan keadaan ideal dari komunitasnya ke dalam makna dirinya, menjadi bagian dari dirinya, sedemikian sehingga dia hanya bisa menyadari eksistensi dirinya ketika keputusan dan tindakannya memberikan kontribusi bagi perwujudan keadaan ideal dari komunitasnya. Pelestarian jiwa dan semangat gotong royong melalui pengembangan karakter individu seperti ini lebih efektif mengatasi situasi dilematis akibat ketegangan antara sisi sosial dan sisi ekonomi dari suatu keputusan atau tindakan di masyarakat, karena sejak awal tesis pemisahan kedua sisi itu sudah ditolak dan tidak menjadi bahan pertimbangan (*rejection of separation thesis*). Hal yang sama tidak terjadi di dalam masyarakat modern dewasa ini, seperti misalnya manajer korporasi yang asalnya menekankan sisi ekonomi dari bisnis yang dijalankannya seringkali harus menemui dilema ketika dituntut untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* demi tercapainya keseimbangan antara sisi ekonomi dan sisi sosialnya.<sup>25</sup> Pelestarian jiwa dan semangat gotong royong melalui pengembangan karakter individu seperti yang dianjurkan di sini juga menjadi semakin penting ketika perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini membuat semakin banyak individu terjerat kebersamaan statis berinteraksi melalui media sosial, seolah-olah hidup hanyalah untuk merayakan interaksi antar individu. Jiwa dan semangat gotong royong yang oleh Sukarno sangat dijunjung tinggi selayaknya terus diupayakan agar tetap lestari, menjadi perekat warga bangsa Indonesia dalam upayanya mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

## CATATAN AKHIR

<sup>1</sup> Di Indonesia ada lebih dari seratus istilah yang berkaitan dengan gotong royong. Lihat daftar istilah gotong royong di Indonesia dalam I Made Purna et.al. (1996), hal. 45-50.

<sup>2</sup> Pidato Sukarno pada sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Lihat: Sukarno (1984), hal. 154-5.

<sup>3</sup> CSIS (1976), hal. 6, 59, 74. Dalam pandangan Suharto, pelaksanaan pembangunan nasional sendiri merupakan perwujudan dari usaha untuk mengamalkan Pancasila sehingga stabilitas nasional selalu menjadi acuan segala program nasional.

<sup>4</sup> Pada tanggal 20 Oktober 2014, Joko Widodo menyebutkan kata “gotong royong” empat kali dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.

<sup>5</sup> Menurut Bintarto (1980), gotong royong jenis pertama berfungsi sebagai jaminan sosial, sedangkan gotong royong jenis kedua merupakan pekerjaan umum.

<sup>6</sup> Lihat Koentjaraningrat (1985: 62-3), Koentjaraningrat (1977:13).

<sup>7</sup> Lihat juga Koentjaraningrat (1985), hal. 37-42.

<sup>8</sup> *Sambatan* adalah kerjasama tolong-menolong antar tetangga dalam bercocok-tanam atau produksi pertanian; *guyuban* adalah kerjasama tolong-menolong dalam pekerjaan-pekerjaan sekitar rumah dan pekarangan; *ronda* adalah kerjasama dalam penjagaan keamanan lingkungan; dan *gugur-gunung* adalah kerjasama dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas umum. Lihat: Koentjaraningrat (1985: 57-60), Koentjaraningrat (1977: 7-8), Bintarto (1980: 16). Hilangnya beberapa praktik gotong royong, lihat: Koentjaraningrat (1987c).

<sup>9</sup> *Tetulang layat* adalah kerjasama spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih pada waktu anggota komunitas mengalami kematian atau bencana. Lihat: Bintarto (1980), hal. 16.

<sup>10</sup> Sukarno (1984), op.cit., hal. 155.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Lihat Scott (1981:255-6) dan Budhisantoso (1985).

<sup>13</sup> Menonjolnya seseorang di dalam komunitas gotong royong dianggap merusak keserasian dan keseimbangan hubungan antar sesama. Untuk mengatasi situasi itu, orang harus membagikan sebagian keberhasilannya dalam bentuk sumbangan kedermawanan (*charity*) dan hajatan-hajatan. Lihat: Budhisantoso (1985), op.cit.

<sup>14</sup> Lihat Koentjaraningrat (1987a).

<sup>15</sup> Tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, lihat misalnya: Ryan & Deci (2003).

<sup>16</sup> Secara ringkas, tanggung jawab profesional seseorang adalah tanggung jawab untuk secara maksimal mengembangkan dan menerapkan keahlian profesionalnya sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat yang telah mengakui dan memberikan legitimasi keberadaan profesi tersebut.

<sup>17</sup> EN (IX.4.1166a.31; IX.9.1169b.7, 1170b.7); EN = “Ethica Nichomachea” in *The Works of Aristotle*, translated into English by W.D. Ross (1915).

<sup>18</sup> Stern-Gillet (1995), hal. 14-17.

<sup>19</sup> Op.cit. EN(IX.9.1170b.5-7).

<sup>20</sup> Endro (2007), hal.137.

<sup>21</sup> Bdk. Endro (2007:141) dan Stern-Gillet (1995:29).

<sup>22</sup> Op.cit. EN(VIII.1.1155a.15-25).

<sup>23</sup> Dalam *Ecosophy-I*, Naess berpendapat bahwa untuk memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya diperlukan proses identifikasi diri (*the self*) dengan “Diri” (“the Self”) atau “*Atman*” dalam kepercayaan Hindu. Naess mendefinisikan identifikasi sebagai “*a spontaneous, non-rational, but not irrational, process through which the interest or interests of another being are reacted to as our own interest or interests*”. Lihat Naess (1993), hal.29-30.

<sup>24</sup> Bagi Sartre, hasrat untuk mengada (*the desire to be*) tak bisa dilepaskan dari hasrat untuk memiliki (*the desire to have*), sehingga tindakan apropriasi merupakan jalan untuk mengada (“*I am what I have*”). Lihat Sartre (1957), hal.575-599. Penerapan filsafat Sartre dalam konteks konsep diri yang diperluas, lihat Belk (1988).

<sup>25</sup> Situasi dilematis bisnis akibat tesis pemisahan (*the separation thesis*) digambarkan dalam Endro (2011). Contoh sistem ekonomi korporasi yang dikembangkan dengan

mengintegrasikan sisi sosialnya adalah sistem kapitalisme Jepang yang oleh Subangun (1995) disebut sebagai “kapitalisme gotong-royong”. Pada perusahaan Jepang, manajemen berperan sebagai mediator dalam proses pembuatan kebijakan dimana keseimbangan terjadi antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan karyawan. Perusahaan besar yang mengalami krisis finansial tidak membiarkan karyawan-karyawannya menderita akibat pemberhentian kerja dengan cara menyalurkannya untuk tetap bekerja pada perusahaan-perusahaan kecil yang terkait.

### KEPUSTAKAAN

- Aristotle. “Ethica Nichomachea”, dalam *The Works of Aristotle: Volume IX*. Translated into English by W.D. Ross, ed. W.D. Ross. Rev. ed. London: Oxford University Press. 1915.
- Bintarto. *Gotong Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Belk, Russell W. “Possessions and the Extended Self”. *Journal of Consumer Research* 15(1988): 139-168.
- Budhisantoso S. “Nilai-Nilai Gotong Royong dan Perwujudannya dalam Masyarakat Indonesia”. *Pameran dan Ceramah Nilai Budaya Gotong Royong Tanggal 19-23 Desember 1985*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, dan Museum Sonobudoyo.
- CSIS (Centre for Strategic and International Studies). *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi. 1976.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. Translated by George Simpson. NY: Free Press – Macmillan Company. 1933.
- Endro, Gunardi. *Integrity in Economic Life: An Aristotelian Perspective*. Dissertation. National University of Singapore. 2007.
- Endro, Gunardi. “Bisnis yang Etis: Suatu Tinjauan Kembali” dalam *Moralitas: Lentera Peradaban Dunia*. Eds. Andre Ata Ujan, F.R. Kainama dan T.S. Gunawan. Kanisius. 2011. h. 233-255.
- I Made Purna, Renggo Astuti dan Wahyuningsih. *Macapat dan Gotong Royong*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta. 1996.

GUNARDI ENDRO – TINJAUAN FILOSOFIS PRAKTIK GOTONG ROYONG

- Kartodirdjo, Sartono A. "Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong Dalam Pembangunan Masyarakat Desa". *Simposium Pembinaan Gotong Royong Dalam Rangka Pembangunan Desa*. Jakarta, 18-19 Januari 1978. Yogyakarta: Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan – Universitas Gadjah Mada.
- Koentjaraningrat. "Sistem Gotong Royong dan Jiwa Gotong Royong". *Berita Antropologi* IX.30 (1977): 4-16.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Koentjaraningrat. "Orientasi Nilai Budaya dalam Kebudayaan Nasional". *Kompas*, 11 Maret 1987 (a).
- Koentjaraningrat. "Gotong Royong dalam Kebudayaan Indonesia I". *Kompas*, 30 Juni 1987 (b).
- Koentjaraningrat. "Gotong Royong dalam Kebudayaan Indonesia II". *Kompas*, 1 Juli 1987 (c).
- Koentjaraningrat. "Gotong Royong dalam Kebudayaan Indonesia III". *Kompas*, 2 Juli 1987 (d).
- Naess, Arne. "Identification as a Source of Deep Ecological Attitudes". Dalam *Radical Environmentalism*. Ed. Peter List. Belmont, California: Wadsworth. 1993. h. 24-38.
- Ryan, R.M. & E.L. Deci. "Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being", dalam *Motivation and Work Behavior*. 7 ed. Eds. L.W. Porter, G.A. Bigley & R.M. Steers. 7ed. NY: McGraw Hill: NY. 2003. h. 49-65.
- Sartre, Jean-Paul. *Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology*. Transl. by Hazel E Barnes. London: Methuen & Co. 1957.
- Scott, James C. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. 1981.
- Stern-Gillet, Suzanne. *Aristotle's Philosophy of Friendship*. Albany: State University of New York Press. 1995.
- Subangun, Emanuel. *Kapitalisme Gotong Royong*. Yogyakarta: CRI Alocita.
- Sukarno. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Inti Idayu Press – Yayasan Pendidikan Soekarno: Jakarta. 1984.

